



## PEMBANGUNAN RUANG KELAS DI SEKOLAH DASAR (KAJIAN DARI ASPEK PEMBIAYAAN)

*Sri Wulansari*

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Correspondence: E-mail: [sriwulansari@upi.edu](mailto:sriwulansari@upi.edu)

### ABSTRACTS

This research aims to analyze the financing scheme for the construction of elementary school classrooms in Bandung Regency. The availability of comfortable classrooms greatly influences the smooth running of the educational process. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data collection was carried out using in-depth interviews and documentation studies at elementary schools in Bandung Regency that received financial assistance to build classrooms for three consecutive years. This research data analysis was carried out in three main steps, namely data reduction, data display and data verification. Research findings are grouped into three categories, namely classroom construction financing schemes, grant fund management, and financial reporting constraints. Grant funds cannot meet all needs because they are not included in the funding regulations, causing schools to have to be creative and innovative to meet these funding shortfalls. Apart from that, it supports good reporting as a form of school accountability. Financial managers need to be given training on preparing financial reports well and in accordance with the rules.

**Keyword:** Dana Alokasi Khusus (DAK), Ruang Kelas Baru (RAB).

### ARTICLE INFO

**Article History:**

*Submitted/Received 18 Jun 2021*

*First Revised 23 Jul 2021*

*Accepted 26 Sept 2022*

*First Available online 29 Aug 2023*

*Publication Date 01 Oct 2023*

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan gedung sekolah seringkali dikaitkan dengan kajian tentang sarana prasarana sekolah. Lingkungan fisik dan fasilitas sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar dipandang unsur penting agar pelaksanaannya berkualitas. Proses belajar mengajar terjadi dalam lingkungan yang terstruktur dan bermakna. Pembelajaran efektif juga tergantung dari ketersediaan gedung sekolah dan fasilitas pembelajaran yang memadai salah satunya adalah ruang kelas (Ojeje dan Adodo, 2018).

Ruang kelas dimaknai sebagai suatu ruang yang berfungsi sebagai sarana dalam proses pembelajaran (Binsa, 2021). Ruang kelas digunakan untuk kegiatan tatap muka antara guru dan siswa dalam berbagai aktivitas pembelajaran. Proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik apabila peserta didik akan merasakan aman dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran, dan hal ini akan menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik. Fasilitas ruang kelas diperlukan untuk realisasi hasil yang berorientasi belajar mengajar (Irmayani et al., 2018).

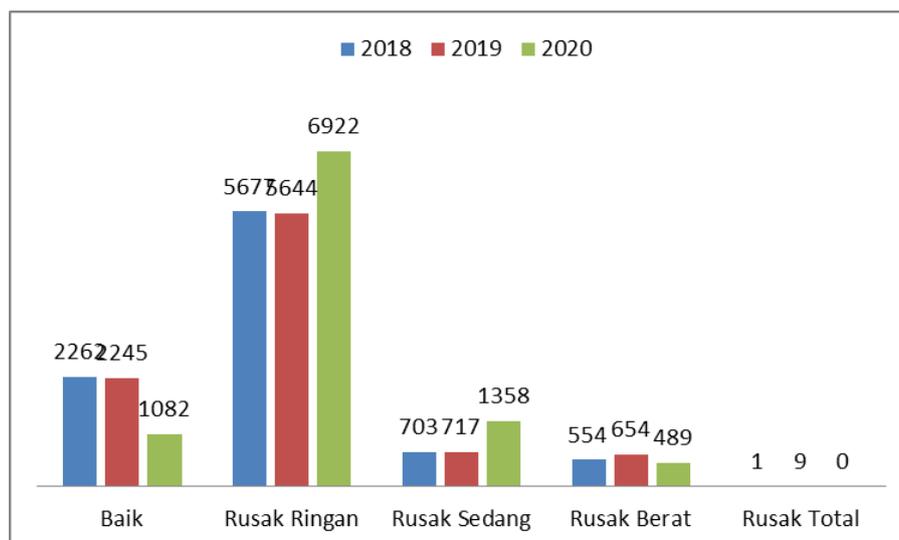
Ketersediaan ruang kelas menjadi hal yang penting dalam rangka mendukung pembelajaran yang berkualitas. Sehingga banyak kajian tentang ketersediaan lingkungan fisik sering dihubungkan dengan prestasi akademik siswa. Namun kajian pembangunan ruang kelas dapat dilihat jugadari sudut panjang pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas menjadi hal yang sangat penting. Sehingga ada yang menyatakan kualitas pendidikan selalu beriringan dengan biaya yang dikeluarkan.

Biaya (*cost*) dalam kajian pendidikan dipandang sebagai sumber daya yang dikorbankan (*scarified*) dalam rangka mencapai tujuan pendidikan (Ardiansyah dan Maftuhah, 2023). Biaya ini dikeluarkan untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana pendidikan. Salah satu dari sarana prasarana pendidikan adalah ruang kelas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan ruang kelas memiliki hubungan yang erat dengan konsep pembiayaan pendidikan.

Biaya pendidikan terdiri dari biaya langsung (*direct cost*), biaya tidak langsung (*indirect cost*), biaya rutin (*recurrent cost*), biaya pembangunan (*capital cost*), biayapribadi (*private cost*), biaya sosial (*social cost*), *monetary cost* dan *nonmonetary cost* (Ferdin, 2013; Desimarnis, 2021). Kaitannya dengan fasilitas pendidikan dikenal istilah biaya rutin dan biaya pembangunan.

Biaya rutin dan biaya pembangunan merupakan bagian dari biaya langsung (Ferdin, 2013). Biaya rutin adalah biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru dan personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan fasilitas pendidikan.

Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, kondisi ruang kelas SD pada tahun 2019 terdapat 654 ruang kelas yang rusak berat, sedangkan tahun 2020 terdapat 489 ruang kelas yang rusak berat dan selebihnya dijelaskan pada **Gambar 1**. Dalam waktu satu tahun kondisi ruang kelas yang rusak berat hanya berkurang 165 ruang kelas (25,2%). Hal ini menggambarkan pertumbuhan yang sangat lambat. Ketersediaan anggaran pemerintah dan tata kelola yang buruk yang berpotensi korupsi menjadi salah satu penyebab kenapa pembangunan ruang kelas sangat lambat pertumbuhannya (Bustari, 2016).



**Gambar 1.** Kondisi Ruang Kelas SD di Kab. Bandung (Sumber: NDP Kemendikbud tahun 2020)

Pada **Gambar 1** dapat dilihat kondisi ruang kelas SD di Kab. Bandung didominasi dengan kondisi yang rusak ringan, sedangkan pada kondisi rusak total menjadi kondisi yang paling sedikit. Bahkan pada tahun 2020 kondisi ruang kelas yang rusak total sudah tidak ada. Secara terperinci data kondisi ruang kelas di Kab. Bandung dapat dilihat pada **Tabel 1**.

**Tabel 1.** Kondisi Ruang Kelas SD di Kabupaten Bandung 2018-2020

	Baik	%	Rusak Ringan	%	Rusak Sedang	%	Rusak Berat	%	Rusak Total	%
<b>2018</b>	2262	24.59	5677	61.73	703	7.64	554	6.02	1	0.01
<b>2019</b>	2245	24.22	5644	60.89	717	7.74	654	7.06	9	0.1
<b>2020</b>	1082	10.98	6922	70.27	1358	13.79	489	4.96	0	0

Kondisi pada **Tabel 1** menggambarkan masing-masing pekerjaan rumah pemerintah daerah bagaimana dapat menyelesaikan permasalahan tentang kondisi ruang kelas ini. Bagaimana pemerintah harus menyediakan banyak dana untuk memperbaiki kondisi ini. Banyaknya ruang kelas yang tidak layak digunakan menjadi masalah paling besar dalam hal ini.

Gedung sekolah seringkali dikaitkan dengan kajian tentang sarana prasarana sekolah. Lingkungan fisik dan fasilitas sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar dipandang sebagai unsur penting agar pelaksanaannya berkualitas. Proses belajar mengajar terjadi dalam lingkungan yang terstruktur dan bermakna. Pembelajaran efektif juga tergantung dari ketersediaan gedung sekolah dan fasilitas pembelajaran yang memadai salah satunya adalah ruang kelas (Okeke, 2013).

Berkaitan dengan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian guna mengkaji pengelolaan sistem informasi di Sekolah Laboratorium UPI, menganalisis seberapa penting tingkat keberhasilan yang diperoleh, bagaimana efektifitas dan efisiensi pengelolaannya, serta bagaimana solusi alternatif pengembangannya.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus mengarah pada pendekatan yang digunakan untuk menelaah permasalahan penelitian dan untuk menemukan data dan informasi yang mendalam tentang topik yang sedang dibahas dalam penelitian. Skema pembangunan ruang kelas dengan menggunakan pendekatan pembiayaan dikaji secara mendalam dalam penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indept interview*) dan studi dokumentasi pada Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bandung yang mendapatkan bantuan dana pembangunan ruang kelas selama tiga tahun berturut-turut.

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan tiga langkah utama yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data. Sedangkan untuk uji keterpercayaan data dilakukan teknik Triangulasi. Triangulasi yaitu untuk mendapatkan temuan dan interpretasi (menafsirkan atau menjelaskan) data yang lebih akurat dan kredibel.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian digambarkan dalam tiga kategori yaitu 1) skema pembiayaan pembangunan ruang kelas, 2) pengelolaan dana pembangunan ruang kelas, dan 3) Kendala dalam pelaporan keuangan pembangunan ruang kelas.

#### i. Skema Pembiayaan Pembangunan RuangKelas

Temuan penelitian tentang skema pembiayaan pembangunan ruang kelas SD di Kabupaten Bandung didapatkan pada dua sumber keuangan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Secara terperinci sumber pendanaan dari APBN dikelompokkan ke dalam dua jenis bantuan.

Bantuan pemerintah yang dananya diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) secara langsung kepada pihak sekolah penerima bantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pendidikan yang dananya diberikan langsung oleh Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah.

#### ii. Pengelolaan Dana Pembangunan RuangKelas

Pengelolaan dana pembangunan ruang kelas dilakukan oleh panitia khusus yang dibentuk oleh satuan pendidikan. Panitia Pembangunan di Satuan Pendidikan (P2S) merupakan tim yang memiliki dasar hukum, sehingga wewenang pengelolaan dana hibah untuk pembangunan ruang kelas secara hukum memiliki wewenang penuh.

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pembentukan panitia pembangunan ini adalah Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja Direktorat Pembinaan SD pada Kependikbud. Peraturan tentang petunjuk pelaksanaan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Dasar hukum lainnya adalah Perpes RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Juknis DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun 2021.

Meskipun pengelolaan dana pembangunan ruang kelas yang bersumber dari bantuan pemerintah atau DAK ini dilakukan oleh panitia pembangunan. Kepala sekolah tetap menjadi penanggungjawab utama dalam pelaksanaannya. Namun terkadang hal tersebut memiliki kendala tersendiri, salah satunya adalah kepala sekolah terkadang kesulitan membagi waktu antara tugas manajerial sekolah dan penanggungjawab pembangunan ruang kelas.

Selain itu, temuan penelitian juga menggambarkan bahwa data sekolah yang menerima bantuan dana pembangunan ruang kelas pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tidak terupdate secara berkala. Sehingga terkadang data sekolah pada Dapodik tidak sama dengan kondisi real di lapangan.

### **iii. Kendala Pelaporan Keuangan**

Pelaporan keuangan hibah pembangunan ruang kelas yang bersumber dari pemerintah memiliki aturan yang ketat. Kejelasan penggunaan dana, kesesuaian, dan bahkan bukti otentik penggunaannya tentu menjadi ukuran pelaporan yang baik. Temuan penelitian pada pelaporan keuangan hibah pembangunan ruang kelas ternyata masih memiliki beberapa kendala.

Kendala yang masih dihadapi oleh panitia pembangunan di satuan sekolah (P2S) diantaranya adalah kemampuan panitia dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), realisasi anggaran dengan menyertakan bukti otentik, serta pembukuan laporan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2S) masih kesulitan merancang RAB dan gambaran perencanaan pembangunan. Hal ini menyebabkan adanya pemborosan anggaran dan fisik bangunan tidak sesuai dengan gambar yang ada pada petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan. Selain itu terkadang realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan rencana juga menjadi kendala lainnya. Kenaikan harga barang-barang menjadikan ketidaksesuaian realisasi anggaran ini terjadi.

Temuan lain juga menunjukkan guru yang diberi tugas tambahan sebagai bendahara panitia pembangunan memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang kurang baik. Kemampuan ini menyebabkan laporan keuangan hibah pembangunan ruang kelas menjadi tidak rapi. Beberapa hal yang terjadi dalam laporan keuangan adalah adanya bukti-bukti pencatatan tidak lengkap mengenai pembelian barang dan upah pekerja, bahkan terkadang bukti pengeluaran masih ada yang belum didukung oleh tanda pengesahan.

## **3.2 Pembahasan Penelitian**

Pembangunan ruang kelas menjadi hal penting dalam rangka mendukung peningkatan mutu pendidikan. Program pembangunan ruang kelas yang sesuai dengan kebutuhan dan standar kualitas yang baik tentu tidak mudah. Unsur yang paling mendominasi terkait dengan hal ini adalah ketersediaan dana. Namun masalah pendanaan ini adalah menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam pembangunan ruang kelas (Bustari, 2016).

Pemerintah telah menyediakan anggaran yang cukup besar dalam rangka membangun fasilitas fisik seperti ruang kelas sebagai penunjang dalam pembelajaran.

Anggaran dari APBN dan APBD menjadi sumber utama hibah pembangunan ruang kelas ini. Pemberian dana secara langsung oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) atau DAK.

Dana hibah yang terbatas merupakan tantangan tersendiri bagi panitia pembangunan di sekolah. Terkadang dana hibah tersebut juga perlu mendapatkan dana tambahan dari internal sekolah. Hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam penggunaan dana hibah, tentu itu menjadi tanggungjawab sekolah dalam pemenuhannya. Penelitian [Adillah \(2016\)](#) menunjukkan bahwa untuk mendapatkan dana guna memenuhi berbagai kebutuhannya, sekolah harus kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan peluang yang ada.

Selain itu sekolah perlu membentuk panitia yang mampu mengelola dana hibah dengan baik. Pengelolaan yang baik memungkinkan dana hibah tersebut digunakan sesuai sasaran dan sesuai dengan aturan. Pengelolaan anggaran pembiayaan yang efektif dapat dilakukan dengan merujuk pada langkah ([Panca dan Zakaria, 2021](#)) berikut: (1) menentukan tujuan; (2) mengestimasi kebutuhan di masa depan; (3) melakukan penilaian kebutuhan; (4) pelaksanaan rencana.

Panitia pembangunan dalam aturan disebut sebagai swakelola, pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri (Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 1). Dalam pelaksanaannya, sekolah wajib melibatkan komite sekolah dan masyarakat sekitar sekolah sesuai dengan Permendiknas Nomor 5 Tahun 2010.

Pada jenis swakelola ini tidak ada penunjukan langsung, pemilihan/seleksi langsung, pelelangan/seleksi umum dalam proses Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan di sekolah. Tidak diperbolehkan menyerahkan pekerjaan kepada sebuah perusahaan atau institusi di luar sekolah, karena proses swakelola oleh penerima hibah harus dilaksanakan sendiri oleh penerima.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban maka panitia pembangunan juga harus membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik tentu laporan yang lengkap dan tepat. Pembuatan laporan yang baik akan sangat ditentukan oleh kompetensi dari bagian keuangan atau bendahara. Laporan keuangan ini juga sebagai bentuk akuntabilitas sekolah. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku ([Larracilla-Salazar et al., 2019](#)).

Laporan pertanggungjawaban merujuk pada laporan mingguan, bulanan, dan laporan akhir dari pembangunan ruang kelas secara keseluruhan. Unsur-unsur yang harus dimuat dalam laporan mingguan dan bulanan adalah:

- (i) informasi volume, satuan dan bobot pekerjaan;
- (ii) prestasi pekerjaan mingguan;
- (iii) jumlah dana yang digunakan; dan
- (iv) foto-foto kemajuan pelaksanaan kegiatan mencakup tampak depan, belakang, samping, dan dalam yang diambil dari titik yang sama.

Sedangkan laporan akhir terdiri dari:

- (i) dokumen penyelesaian fisik;
- (ii) dokumen penggunaan dana; dan

- (iii) foto-foto pelaksanaan kegiatan (0%, 40%, 70%, dan 100%) yang diambil dari titik yang sama.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa skema pembiayaan pembangunan ruang kelas bersumber dari dua sumber dana yaitu APBN dan APBD, secara langsung diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana hibah ini terkadang tidak dapat memenuhi kebutuhan pembangunan karena ada hal-hal yang tidak dapat dianggarkan melalui dana hibah tersebut, sehingga sekolah perlu kreatif dan inovatif dalam mencari dana tambahan untuk pembangunan tersebut. Selain itu sekolah harus berusaha mengelola dana dengan baik agar tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pelatihan bagi panitia pembuatan laporan dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan bendahara pembangunan dalam membuat laporan keuangan yang baik.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, G. (2016). Manajemen keuangan sekolah. *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana*, 10(4), 343-346.
- Adriansyah, H., & Maftuhah, M. (2023). Pengelolaan pembiayaan pendidikan Sekolah Dasar Negeri Poris Pelawad 5 Kota Tangerang. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 1-24.
- Binsa, U. H. (2021). Manajemen sarana prasarana pendidikan anak usia dini di TK Pelangi Anak Negeri Yogyakarta. *Jurnal CARE (Children Advisory Research and Education)*, 8(2), 1-10.
- Bustari, M. (2016). Optimalisasi rehabilitasi ruang kelas dalam mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun. *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY*, 12(2), 113156.
- Desimarnis, D. (2021) Analisis pembiayaan pendidikan di Madrasah. *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2559-2572.
- Ferdi, W. P. (2013). Pembiayaan pendidikan: Suatu kajian teoritis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(4), 565-578.
- Irmayani, H., Wardiah, D., & Kristiawan, M. (2018). The strategy of SD Pusri in improving educational quality. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 7(7), 113-121.
- Larracilla-Salazar, N., Peña-Osorio, I. Y., & Molchanova, V. S. (2019). Education and financial inclusion: An empirical study in students of higher education. *European Journal of Contemporary Education*, 8(4), 810-818.
- Ojeje, M. A., & Adodo, A. (2018). Education infrastructure in Nigeria: An analysis of provision of school building facility in secondary schools in Delta State Nigeria. *Journal of Education and Entrepreneurship*, 5(3), 49-60.
- Okeke, F. N. (2013). Management of facilities in the classroom. *Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies*, 4(1), 100-104.

Panca, S., & Zakaria, Z. (2021). Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan sekolah (Studi deskriptif kualitatif di SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan). *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana*, 15(2), 39-42.